



WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 147 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, serta dalam rangka memfasilitasi usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 147 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 147 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 147 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 147 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
3. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai akibat pergeseran anggaran dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 7 April 2021

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 7 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 25/A



PEMERINTAH KOTA BATU
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

1	2	3		4	5 = 4 - 3		6	7
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN		(Rp)	%		
4	PENDAPATAN DAERAH	998.770.629.182,00	998.770.629.182,00	0,00	0,00			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.01	Pajak Daerah	149.524.960.017,00	149.524.960.017,00	0,00	0,00			
4.1.01.06	Pajak Hotel	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	24.354.478.850,00	24.354.478.850,00	0,00	0,00			
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	920.722.834,00	920.722.834,00	0,00	0,00			
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	1.300.755.166,00	1.300.755.166,00	0,00	0,00			
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	924.043.150,00	924.043.150,00	0,00	0,00			
4.1.01.07	Pajak Restoran	15.105.329.506,00	15.105.329.506,00	0,00	0,00			
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.137.899.214,00	10.137.899.214,00	0,00	0,00			
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.966.028.866,00	2.966.028.866,00	0,00	0,00			
4.1.01.07.04	Pajak Kafe dan Sejenisnya	2.190.878,00	2.190.878,00	0,00	0,00			
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	112.658.425,00	112.658.425,00	0,00	0,00			
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.866.552.123,00	1.866.552.123,00	0,00	0,00			
4.1.01.08	Pajak Hiburan	30.728.534.234,00	30.728.534.234,00	0,00	0,00			
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	987.869.073,00	987.869.073,00	0,00	0,00			
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kostoran/Musik/Tari/Busana	82.582.000,00	82.582.000,00	0,00	0,00			
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	27.076.866.306,00	27.076.866.306,00	0,00	0,00			
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	68.988.875,00	68.988.875,00	0,00	0,00			
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.468.843.183,00	2.468.843.183,00	0,00	0,00			
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	42.859.342,00	42.859.342,00	0,00	0,00			
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	525.455,00	525.455,00	0,00	0,00			
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00			
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Mikrotron/ Megatron	740.759.990,00	740.759.990,00	0,00	0,00			
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Lain	259.240.010,00	259.240.010,00	0,00	0,00			
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.578.291.532,00	1.578.291.532,00	0,00	0,00	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.578.291.532,00	1.578.291.532,00	0,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBSP2)	14.760.000.000,00	14.760.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	14.760.000.000,00	14.760.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	43.377.804.745,00	43.377.804.745,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	43.377.804.745,00	43.377.804.745,00	0,00	0,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	18.161.313.942,00	18.161.313.942,00	0,00	0,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	12.272.896.671,00	12.272.896.671,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	626.972.264,00	626.972.264,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	35.018.633,00	35.018.633,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.454.624.491,00	1.454.624.491,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	156.281.283,00	156.281.283,00	0,00	0,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.850.917.271,00	2.850.917.271,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.150.592.517,00	2.150.592.517,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	533.728.754,00	533.728.754,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Pocong Hewan	81.775.000,00	81.775.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	84.821.000,00	84.821.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.037.500.000,00	3.037.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.03	Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.234.287.207,00	4.234.287.207,00	0,00	0,00	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.234.287.207,00	4.234.287.207,00	0,00	0,00	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.843.010.916,00	2.843.010.916,00	0,00	0,00	
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Ankda Usaha)	439.873.658,00	439.873.658,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	951.402.633,00	951.402.633,00	0,00	0,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.079.436.834,00	28.079.436.834,00	0,00	0,00	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.118.225.025,00	10.118.225.025,00	0,00	0,00	
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	9.118.225.025,00	9.118.225.025,00	0,00	0,00	
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	4.800.224.906,00	4.800.224.906,00	0,00	0,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.649.026.271,00	4.649.026.271,00	0,00	0,00	
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	151.198.635,00	151.198.635,00	0,00	0,00	
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.757.860.932,00	2.757.860.932,00	0,00	0,00	
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.757.860.932,00	2.757.860.932,00	0,00	0,00	
4.1.04.08	Penerimaan atas Tunjangan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	621.837.089,00	621.837.089,00	0,00	0,00	
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	621.837.089,00	621.837.089,00	0,00	0,00	
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Ekskusi atas Jaminan	81.424.354,00	81.424.354,00	0,00	0,00	
4.1.04.14.01	Hasil Ekskusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	81.424.354,00	81.424.354,00	0,00	0,00	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	7.015.000,00	7.015.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.634.674.500,00	5.634.674.500,00	0,00	0,00	
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.634.674.500,00	5.634.674.500,00	0,00	0,00	
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.558.177.028,00	2.558.177.028,00	0,00	0,00	
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.558.177.028,00	2.558.177.028,00	0,00	0,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	782.675.529.182,00	782.675.529.182,00	0,00	0,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	689.973.686.030,00	689.973.686.030,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.01.01	Dana Penimbangan	608.654.597.000,00	608.654.597.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	70.605.521.000,00	70.605.521.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	460.251.693.000,00	460.251.693.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	25.008.552.000,00	25.008.552.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	52.788.831.000,00	52.788.831.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	49.861.061.000,00	49.861.061.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02.01	DID	49.861.061.000,00	49.861.061.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	31.458.028.000,00	31.458.028.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	31.458.028.000,00	31.458.028.000,00	0,00	0,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.701.843.182,00	92.701.843.182,00	0,00	0,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	57.701.843.182,00	57.701.843.182,00	0,00	0,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.701.843.182,00	57.701.843.182,00	0,00	0,00	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.095.100.000,00	16.095.100.000,00	0,00	0,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.095.100.000,00	16.095.100.000,00	0,00	0,00	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	16.095.100.000,00	16.095.100.000,00	0,00	0,00	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	16.095.100.000,00	16.095.100.000,00	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH	1.087.361.986.047,00	1.087.361.986.047,00	0,00	0,00	
5.1	BELANJA OPERASI	813.534.106.685,00	815.438.106.685,00	1.904.000.000,00	0,23	
5.1.01	Belanja Pegawai	387.664.239.677,00	387.664.239.677,00	0,00	0,00	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	227.382.537.388,00	227.382.537.388,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	171.432.963.271,00	171.432.963.271,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.405.733.029,00	16.405.733.029,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.612.642.661,00	5.612.642.661,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.525.619.779,00	7.525.619.779,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.317.450.371,00	4.317.450.371,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.292.443.860,00	9.292.443.860,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	390.085.027,00	390.085.027,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.064.229,00	8.064.229,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.327.730.284,00	10.327.730.284,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	359.523.389,00	359.523.389,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.054.838.226,00	1.054.838.226,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	655.443.262,00	655.443.262,00	0,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	81.541.148.843,00	81.541.148.843,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	31.738.478.041,00	31.738.478.041,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kontrol Kerja ASN	5.037.536.722,00	5.037.536.722,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.629.252.376,00	1.629.252.376,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	43.135.881.704,00	43.135.881.704,00	0,00	0,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.480.965.482,00	57.480.965.482,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.885.748.801,00	3.885.748.801,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	39.127.565.000,00	39.127.565.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tambahan) Guru PNSD	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	157.600.000,00	157.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	13.864.851.681,00	13.864.851.681,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengabdian BM4D	250.200.000,00	250.200.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.293.030.330,00	19.293.030.330,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	575.820.000,00	575.820.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	62.395.200,00	62.395.200,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.430.144,00	83.430.144,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.582.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	834.939.000,00	834.939.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kebutuhan DPRD	82.580.400,00	82.580.400,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kebutuhan Lainnya DPRD	21.193.200,00	21.193.200,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	802.992,00	802.992,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.012.854.536,00	9.012.854.536,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.760.911.000,00	3.760.911.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	75.521.858,00	75.521.858,00	0,00	0,00	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/MKDH	1.164.957.634,00	1.164.957.634,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/MKDH	58.765.093,00	58.765.093,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/MKDH	7.691.040,00	7.691.040,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/MKDH	103.625.200,00	103.625.200,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/MKDH	6.820.878,00	6.820.878,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/MKDH	10.150.472,00	10.150.472,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.05.06	Belanja Pembelian Gaji KDH/WKDH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.977.037,00	5.977.037,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	122.429,00	122.429,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	367.286,00	367.286,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	971.437.199,00	971.437.199,00	0,00	0,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.349.006.590,00	363.253.006.590,00	1.904.000.000,00	0,53	
5.1.02.01	Belanja Barang	82.635.941.966,00	82.635.941.966,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	82.509.428.766,00	82.509.428.766,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	126.513.200,00	126.513.200,00	0,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	180.921.410.784,00	182.825.410.784,00	1.904.000.000,00	1,05	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	123.190.295.250,00	125.094.295.250,00	1.904.000.000,00	1,55	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Auransi	32.092.955.250,00	32.092.955.250,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	149.090.000,00	149.090.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Perakitan dan Mesin	3.064.270.500,00	3.064.270.500,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.288.632.700,00	2.288.632.700,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jembatan dan Lingas	78.997.200,00	78.997.200,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.523.287.254,00	5.523.287.254,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.120.018.630,00	5.120.018.630,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.356.114.000,00	6.356.114.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.823.033.820,00	22.823.033.820,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.755.573.540,00	10.755.573.540,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.033.735.587,00	11.033.735.587,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Lingas	935.904.293,00	935.904.293,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	97.820.400,00	97.820.400,00	0,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.228.016.500,00	28.228.016.500,00	0,00	0,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.792.028.500,00	27.792.028.500,00	0,00	0,00	
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	435.988.000,00	435.988.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.05	Belanja Lain-lain atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.492.759.200,00	16.492.759.200,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	702.468.200,00	702.468.200,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.790.290.000,00	15.790.290.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.247.844.320,00	30.247.844.320,00	0,00	0,00	
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.247.844.320,00	30.247.844.320,00	0,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.790.631.618,00	50.790.631.618,00	0,00	0,00	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.054.335.718,00	50.054.335.718,00	0,00	0,00	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Diberikut Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	41.743.815.885,00	41.743.815.885,00	0,00	0,00	
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Tanda	3.641.632.005,00	3.641.632.005,00	0,00	0,00	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.678.887.828,00	4.678.887.828,00	0,00	0,00	
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	726.295.900,00	726.295.900,00	0,00	0,00	
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	726.295.900,00	726.295.900,00	0,00	0,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.730.228.800,00	13.730.228.800,00	0,00	0,00	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	12.080.228.800,00	12.080.228.800,00	0,00	0,00	
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	12.080.228.800,00	12.080.228.800,00	0,00	0,00	
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Bidang Lainnya)	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Jang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Bidang Lainnya)	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL	161.666.917.477,00	161.666.917.477,00	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.583.207.753,00	31.583.207.753,00	0,00	0,00	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.421.993.950,00	1.421.993.950,00	0,00	0,00	
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	379.899.900,00	379.899.900,00	0,00	0,00	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.042.094.050,00	1.042.094.050,00	0,00	0,00	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.185.093.000,00	5.185.093.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.017.613.000,00	5.017.613.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	168.480.000,00	168.480.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.340.411.875,00	7.340.411.875,00	0,00	0,00	
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	24.370.800,00	24.370.800,00	0,00	0,00	
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.813.800,00	6.813.800,00	0,00	0,00	
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	7.309.227.275,00	7.309.227.275,00	0,00	0,00	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	18.003.250,00	18.003.250,00	0,00	0,00	
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	18.003.250,00	18.003.250,00	0,00	0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.563.476.515,00	3.563.476.515,00	0,00	0,00	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	719.185.890,00	719.185.890,00	0,00	0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.273.324.875,00	2.273.324.875,00	0,00	0,00	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	570.965.750,00	570.965.750,00	0,00	0,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	967.761.900,00	967.761.900,00	0,00	0,00	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	813.703.600,00	813.703.600,00	0,00	0,00	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	154.058.300,00	154.058.300,00	0,00	0,00	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.186.618.550,00	2.186.618.550,00	0,00	0,00	
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	24.584.050,00	24.584.050,00	0,00	0,00	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.162.034.500,00	2.162.034.500,00	0,00	0,00	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.115.521.070,00	1.115.521.070,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	130.142.000,00	130.142.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	586.208.900,00	586.208.900,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	364.969.870,00	364.969.870,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	34.200.300,00	34.200.300,00	0,00	0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.979.922.020,00	6.979.922.020,00	0,00	0,00	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.006.816.056,00	3.006.816.056,00	0,00	0,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.973.105.964,00	3.973.105.964,00	0,00	0,00	
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	224.874.200,00	224.874.200,00	0,00	0,00	
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	224.874.200,00	224.874.200,00	0,00	0,00	
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Penggeboran	17.441.500,00	17.441.500,00	0,00	0,00	
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Penggeboran Mesin	4.464.750,00	4.464.750,00	0,00	0,00	
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Penggeboran Non Mesin	12.976.750,00	12.976.750,00	0,00	0,00	
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	230.332.498,00	230.332.498,00	0,00	0,00	
5.2.02.13.01	Belanja Modal Surnir	230.332.498,00	230.332.498,00	0,00	0,00	
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Kesenjangan Kerja	742.944.800,00	742.944.800,00	0,00	0,00	
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	618.526.300,00	618.526.300,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Peleirung	124.418.500,00	124.418.500,00	0,00	0,00	
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	1.423.125,00	1.423.125,00	0,00	0,00	
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	1.423.125,00	1.423.125,00	0,00	0,00	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	556.389.500,00	556.389.500,00	0,00	0,00	
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	556.389.500,00	556.389.500,00	0,00	0,00	
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.725.856.552,00	55.725.856.562,00	0,00	0,00	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	55.405.500.810,00	55.405.500.810,00	0,00	0,00	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.405.500.810,00	55.405.500.810,00	0,00	0,00	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Tikor Kontrol/Pasir	320.355.752,00	320.355.752,00	0,00	0,00	
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Beras	320.355.752,00	320.355.752,00	0,00	0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.558.855.306,00	70.558.855.366,00	0,00	0,00	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	57.323.468.027,00	57.323.468.027,00	0,00	0,00	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	51.683.092.598,00	51.683.092.598,00	0,00	0,00	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.640.366.429,00	5.640.366.429,00	0,00	0,00	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.564.629.876,00	5.564.629.876,00	0,00	0,00	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.061.282.984,00	5.061.282.984,00	0,00	0,00	
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	247.974.608,00	247.974.608,00	0,00	0,00	
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5.031.547,00	5.031.547,00	0,00	0,00	
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	241.540.737,00	241.540.737,00	0,00	0,00	
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.905.971.490,00	2.905.971.490,00	0,00	0,00	
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.997.049.932,00	1.997.049.932,00	0,00	0,00	
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	86.829.800,00	86.829.800,00	0,00	0,00	
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengamanan	122.091.758,00	122.091.758,00	0,00	0,00	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.758.765.973,00	4.758.765.973,00	0,00	0,00	
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	4.758.765.973,00	4.758.765.973,00	0,00	0,00	
5.2.05	Belanja Modal Aspek Tetap Lainnya	3.798.997.736,00	3.798.997.736,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	839.242.736,00	839.242.736,00	0,00	0,00	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	251.150.000,00	251.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	588.092.736,00	588.092.736,00	0,00	0,00	
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	639.139.380,00	639.139.380,00	0,00	0,00	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	639.139.380,00	639.139.380,00	0,00	0,00	
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.270.615.680,00	2.270.615.680,00	0,00	0,00	
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.270.615.680,00	2.270.615.680,00	0,00	0,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.848.585.089,00	8.944.585.089,00	(1.904.000.000,00)	(17,55)	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.848.585.089,00	8.944.585.089,00	(1.904.000.000,00)	(17,55)	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.848.585.089,00	8.944.585.089,00	(1.904.000.000,00)	(17,55)	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.848.585.089,00	8.944.585.089,00	(1.904.000.000,00)	(17,55)	
5.4	BELANJA TRANSFER	101.312.376.796,00	101.312.376.796,00	0,00	0,00	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.768.627.396,00	16.768.627.396,00	0,00	0,00	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	14.952.496.002,00	14.952.496.002,00	0,00	0,00	
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	14.952.496.002,00	14.952.496.002,00	0,00	0,00	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.816.131.394,00	1.816.131.394,00	0,00	0,00	
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.816.131.394,00	1.816.131.394,00	0,00	0,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	84.543.749.400,00	84.543.749.400,00	0,00	0,00	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	84.543.749.400,00	84.543.749.400,00	0,00	0,00	
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	53.085.721.400,00	53.085.721.400,00	0,00	0,00	
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	31.458.028.000,00	31.458.028.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(88.591.356.865,00)	(88.591.356.865,00)	0,00	0,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.237.806.865,00	94.237.806.865,00	0,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	94.237.806.865,00	94.237.806.865,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembayaan	94.237.806.865,00	94.237.806.865,00	0,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	94.237.806.865,00	94.237.806.865,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELAJARAN PEMBIAYAAN	5.646.450.000,00	5.646.450.000,00	0,00	0,00	
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah	5.646.450.000,00	5.646.450.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyerahan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.646.450.000,00	5.646.450.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyerahan Modal Daerah pada BUMD	5.646.450.000,00	5.646.450.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	88.591.356.865,00	88.591.356.865,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO